

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* yang menganalisis hubungan kausal Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Penelitian dibagi dalam tiga objek penelitian yaitu Pertama, penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Kanwil di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II (Wajib Pajak Badan Kanwil); Kedua, Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan klasifikasi Menengah (Wajib Pajak Badan Madya) pada KPP Madya dalam lingkup Kanwil DJP Jawa Barat II; dan Ketiga, penelitian terhadap Wajib Pajak klasifikasi Kecil (Wajib Pajak Badan Pratama) pada KPP Pratama di lingkup Kanwil DJP Jawa Barat II.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Unit sampel diambil dari populasi sedangkan unit analisis atau respondennya adalah individu pemilik, direksi atau yang mewakili perusahaan dalam pelaporan Penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Data yang diperoleh berupa jawaban kuisisioner, diberi skor dan kemudian diuji dan dianalisis untuk sampai pada suatu kesimpulan.

### 3.2 Metode Analisis Data : *Structural Equation Modelling* (SEM)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM). SEM digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal yang terjadi antara variabel yang tidak dapat diamati secara langsung (unobserved variable), melainkan melalui indikator-indikatornya. Metode analisis data SEM adalah perpaduan dari ekonometri, psikometri dan sosiometri. Seperti diuraikan oleh Wijanto (2008), teori dan model dalam ilmu sosial dan perilaku umumnya diformulasikan menggunakan konsep-konsep teoritis atau konstruk-konstruk yang

tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Meskipun demikian, kita masih bisa menemukan beberapa indikator atau gejala yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep-konsep teoritis tersebut.

Penelitian ini berfokus pada perilaku dan merupakan penelitian yang bersifat multidimensi. Variabel perilaku tidak dapat diukur secara langsung dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. Menurut Gujarati (1995) penggunaan variabel-variabel laten (variabel yang tidak dapat diamati langsung) pada regresi berganda menimbulkan kesalahan-kesalahan pengukuran (*measurement errors*) yang berpengaruh pada estimasi parameter baik dari sudut *biased-unbiased* maupun besar kecilnya *variance*. Masalah kesalahan pengukuran ini dapat diatasi dengan SEM melalui persamaan-persamaan yang ada pada model pengukuran. Parameter-parameter dari persamaan pada model pengukuran SEM merupakan muatan faktor atau *loading factor* dari variabel laten terhadap indikator-indikator atau variabel-variabel teramati terkait. Dengan demikian, selain memberikan informasi tentang hubungan kausal simultan di antara variabel-variabelnya, SEM juga memberikan informasi tentang muatan faktor dan kesalahan-kesalahan pengukuran.

Dalam *Structural Equation Modelling*, variabel dapat digolongkan menjadi :

- a. Variabel laten (*latent variable*) atau variabel bentukan. Variabel laten merupakan konsep abstrak seperti sikap, perilaku, perasaan dan motivasi, yang hanya dapat diamati dan diukur melalui indikator-indikatornya yang menjadi variabel pengukuran atau variabel teramati. Variabel laten terbagi dua yaitu :
  1. Variabel laten endogen yaitu variabel laten yang dipengaruhi.
  2. Variabel laten eksogen yaitu variabel laten yang mempengaruhi.
- b. Variabel terukur (*measured variable*) atau variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. Dalam penelitian survei dengan menggunakan kuisioner, maka tiap pertanyaan dalam kuisioner merupakan variabel teramati untuk mengukur variabel eksogen.

Dalam penelitian ini terdapat dua tingkatan variabel laten eksogen yaitu *first order latent variable* dan *high order latent variable*. *First order latent variable* adalah variabel-variabel laten yang langsung mempengaruhi/mendasari variabel teramati. *Higher order latent variable* adalah variabel laten yang lebih umum dan abstrak yang mendasari atau mempengaruhi variabel laten tingkat satu atau *first order*. Variabel-variabel laten yang langsung mempengaruhi/mendasari variabel teramati mungkin dipengaruhi oleh variabel laten yang tidak perlu berhubungan langsung dengan variabel-variabel teramati tersebut (Wijanto, 2008: 27). *First order latent variabel* dalam penelitian ini adalah (diikhtisarkan dalam defenisi operasionalisasi variabel) :

- Variabel laten eksogen Persepsi Wajib Pajak dengan tujuh indikatornya
- Variabel laten eksogen Pengetahuan Perpajakan dengan enam indikatornya
- Variabel laten eksogen Kondisi Keuangan dengan empat indikatornya
- Variabel laten eksogen Kualitas SDM dengan empat indikatornya
- Variabel laten eksogen Kualitas Pelayanan dengan lima indikatornya
- Variabel laten eksogen Sistem Tehnologi Informasi dengan tiga indikatornya
- Variabel laten eksogen Pemeriksaan Pajak dengan enam indikatornya
- Variabel laten eksogen Sanksi Adinistrasi dan Pidana dengan empat indikatornya
- Variabel laten eksogen Kepatuhan Materil dengan empat indikatornya
- Variabel laten eksogen Kepatuhan Formil dengan dua indikatornya

Sedangkan *higher order latent variable* dalam penelitian ini adalah :

- Pada *higher order latent variable* Kesadaran Wajib Pajak terdapat tiga variabel laten eksogen *first order* yang menjadi indikatornya yaitu : persepsi Wajib Pajak, pengetahuan/pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan.

- Pada *higher order latent variable* Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terdapat tiga variabel laten eksogen *first order* yang menjadi indikatornya yaitu kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan dan sistem teknologi informasi.
- Pada *higher order latent variable* Tindakan Penegakan Hukum terdapat dua variabel laten eksogen *first order* yang menjadi indikatornya yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi administrasi dan pidana.
- Pada *higher order latent variable* Kepatuhan Wajib Pajak terdapat dua variabel laten eksogen *first order* yang menjadi indikatornya yaitu : kepatuhan formal dan kepatuhan materil.

Strategi permodelan dalam SEM yang digunakan dalam penelitian adalah Strategi Pengembangan Model atau *Model Development Strategy* (Hair et.al, 1988) atau *Model Generating/MG* (Joreskog and Sorbom,1996). Pada strategi permodelan ini suatu model awal dispesifikasikan dan data empiris dikumpulkan. Jika model awal tersebut tidak cocok dengan data empiris yang ada, maka model dimodifikasi dan diuji kembali dengan data yang sama. Beberapa model dapat diuji dalam proses ini untuk mencari suatu model yang selain cocok dengan data secara baik, tetapi juga mempunyai sifat bahwa setiap parameternya dapat diartikan dengan baik. Respesifikasi terhadap model dapat dilakukan berdasarkan *theory driven* atau *data driven*, meskipun respesifikasi berdasarkan *theory driven* lebih dianjurkan (Wijanto, 2008: 68).

Model penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan dua tahap atau “*two step approach*” (Winjanto, 2008) yang meliputi :

1. Analisis model pengukuran (*Measurement Model*) dengan menggunakan CFA. Analisis ini dilakukan untuk memastikan apakah berbagai indikator atau variabel teramati yang ditentukan secara teoritis dapat dimasukkan dalam kelompok masing-masing variabel laten seperti dalam model penelitian.
2. Tahap selanjutnya adalah menyederhanakan model pengukuran, dengan melakukan beberapa tahap pengolahan data yaitu :

- a. analisis terhadap model-model pengukuran yang ada dalam model penelitian;
  - b. perhitungan *Latent Variabel Score* (LVS) dari variabel-variabel laten eksogen tingkat satu (*first order latent variable*) yang diperlukan untuk penyederhanaan model. Pada Model Penyederhanaan, variabel-variabel laten eksogen tingkat satu (*first order latent variable*) akan menjadi indikator bagi *higher order latent variable*.
  - c. analisa terhadap model pengukuran CFA dari model penelitian yang telah disederhanakan (Model Penyederhanaan).
3. Analisa model struktural (*Structural Model*), yang dilakukan untuk menganalisa hubungan antara semua variabel laten dari model yang telah disederhanakan.

### 3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah Wajib Pajak Badan dalam lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Dipilihnya Kanwil DJP Jawa Barat II sebagai objek penelitian dengan alasan sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai hubungan kausal Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Pajak dengan analisis data mengenai perilaku belum pernah dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, padahal pemahaman mengenai hal ini sangat penting.
2. Kanwil DJP Jawa Barat II telah melakukan Modernisasi berdasarkan : KMK. No.238/KMK.01/2006 tanggal 01 Juli 2006
3. Wajib Pajak Badan pada Kanwil DJP Jawa Barat II cukup banyak dan bervariasi dalam status usaha dan bentuk usaha (kondisi yang majemuk) sehingga dapat merepresentasikan kondisi Wajib Pajak di Indonesia.
4. Sebesar 90% penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II berasal dari setoran pajak atas kewajiban pajak Wajib Pajak Badan, yaitu PPh pasal 21,22,23,26, PPh pasal 25, PPh Final, PPN Dalam Negeri, PPN Impor dan PPn BM.

Dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga untuk mempelajari dan meneliti seluruh populasi Wajib Pajak Badan pada setiap KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II, maka dilakukan pemilihan sampel KPP yang akan mewakili populasi KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang dalam pemilihan didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan KPP yang akan dijadikan sampel berdasarkan :

1. Pembagian strata dalam pemilihan sampel terdiri dari Wajib Pajak Badan klasifikasi Menengah (WP terdaftar pada KPP Madya/*Medium Tax Office*) yang berjumlah 1 (satu) KPP Madya dan Wajib Pajak Badan klasifikasi Kecil (WP terdaftar pada KPP Pratama/*Small Tax Office*) yang berjumlah 16 KPP Pratama. Dalam lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II hanya terdapat satu KPP Madya yaitu KPP Madya Bekasi. Dengan demikian KPP Madya Bekasi menjadi satu-satunya KPP yang mewakili Wajib Pajak Badan klasifikasi Menengah.
2. KPP Pratama dalam lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II yang berjumlah 16 KPP Pratama memiliki karakteristik Wajib Pajak Badan yang homogen (Wajib Pajak Badan klasifikasi kecil). Dengan demikian penentuan KPP Pratama yang akan dijadikan sampel dalam penelitian akan dibagi berdasarkan pencapaian target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP yang target penerimaan tercapai ( $\geq 100$  persen) dan KPP yang target penerimaan tidak tercapai ( $\leq 100$  persen). Dipilihnya karakteristik tersebut berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja dari KPP terkait. Jika target penerimaan KPP tercapai maka Wajib Pajak Badan pada KPP tersebut tergolong relatif patuh dan kinerja KPP terkait juga baik, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada penetapan rencana/target penerimaan oleh Kantor Pusat DJP sebagai unit pengambil kebijakan dan penetapan target tiap-tiap KPP telah mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi Wajib Pajak dan perekonomian daerah lingkup wilayah di tiap KPP. Dari bagian KPP Pratama yang tercapai penerimaannya (7 KPP Pratama) akan dipilih 2 KPP Pratama dan dari bagian KPP Pratama yang tidak tercapai penerimaannya (9 KPP Pratama) akan dipilih 2 KPP Pratama. KPP Pratama

yang dipilih sebagai sampel pada KPP yang tercapai target penerimaannya adalah KPP Pratama Bekasi Selatan dan KPP Pratama Karawang Utara, sedangkan KPP yang dipilih sebagai sampel pada KPP yang tidak tercapai target penerimaannya adalah KPP Pratama Cikarang Selatan dan KPP Pratama Subang.

Tabel 3.1 Peringkat Pencapaian Penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat II tahun 2008

URUTAN PERINGKAT PENCAPAIAN				
No.Urut	KPP	TARGET 2008 sesuai KEP-131	PENERIMAAN	CAPAIAN
1	BEKASI UTARA	596.304.615.657	686.102.488.741	115,06
2	BEKASI SELATAN	576.266.947.598	645.878.502.897	112,08
3	CIKARANG UTARA	194.300.569.410	213.380.385.473	109,82
4	BOGOR	479.867.009.416	526.213.765.655	109,66
5	KARAWANG UTARA	548.085.906.469	588.551.267.296	107,38
6	DEPOK	589.288.102.432	615.196.548.951	104,40
7	C I A W I	97.695.077.140	101.629.211.712	104,03
8	MADYA BEKASI	5.609.989.036.197	5.733.191.064.823	102,20
9	CILEUNGI	384.140.044.696	381.199.642.583	99,23
10	INDRAMAYU	220.130.227.800	217.442.529.915	98,78
11	CIREBON	484.124.901.463	474.661.328.558	98,05
12	KUNINGAN	114.822.149.883	112.486.659.544	97,97
13	KARAWANG SELATAN	397.636.910.794	374.043.207.345	94,07
14	CIKARANG SELATAN	639.356.925.520	588.935.728.142	92,11
15	CIBINONG	524.839.716.960	480.259.719.461	91,51
16	CIBITUNG	179.924.934.930	162.588.258.248	90,36
17	SUBANG	131.886.168.008	115.235.567.440	87,38
<b>KANWIL DJP JAWA BARAT II</b>		<b>11.768.659.244.372</b>	<b>12.016.995.876.784</b>	<b>102,11</b>

Sumber : Bidang Duktekkon Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II

Setelah diperoleh KPP yang akan dijadikan sampel, kemudian ditentukan Wajib Pajak Badan yang akan dijadikan sampel Wajib Pajak Badan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II. Wajib Pajak Badan yang akan menjadi unit analisis/responden adalah Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II lebih dari 1 tahun
2. Sudah pernah mengalami pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP.

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada telaah pustaka yang dilakukan oleh Ferdinand (2002, dalam Kusnendi, 2008:54) yang menyimpulkan pedoman ukuran sampel minimal dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel laten. Jumlah sampel adalah 5 sampai dengan 10 kali jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel laten. Karena model penelitian ini menggunakan 10 indikator maka jumlah sampel minimal yang harus digunakan untuk setiap analisis objek penelitian adalah 50 sampel. Dengan demikian sampel minimal untuk analisis Wajib Pajak Badan Madya dan analisis Wajib Pajak Badan Pratama masing-masing adalah sebesar 50 sampel. Total sampel minimal Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II (penjumlahan sampel Wajib Pajak Badan Madya dan sampel Wajib Pajak Badan Pratama) adalah sebesar 100 sampel.

Penentuan perbandingan besarnya jumlah sampel Wajib Pajak Badan Madya dan Wajib Pajak Badan Pratama yang akan diolah untuk analisis data Kanwil didasarkan pada perbandingan proporsi penerimaan pajak KPP Madya dan KPP Pratama dari total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat II seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Proporsi Penerimaan KPP Madya dan KPP Pratama

<b>KPP</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Proporsi</b>
KPP Madya	5.733.191.064.823	45 %
KPP Pratama	6.283.804.811.961	55 %
Total Penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat II	12.016.995.876.784	100 %

Pengumpulan data dengan kuisisioner dilakukan dengan menggunakan metode survei surat atau *mail survey*. Kelebihan menggunakan metode survei surat adalah dapat mencapai orang-orang yang sulit ditemui atau dicapai seperti para eksekutif perusahaan. Kelemahan survei surat ini adalah tidak adanya tanggapan dari responden. Menurut Cooper and Emory (1996:302) pada umumnya tingkat pengembalian kuisisioner dengan metode *mail survey* sebesar 30 persen sudah cukup memuaskan.<sup>109</sup> Mengingat penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan Usaha yang diperkirakan akan lebih sulit diperoleh data observasinya, maka peneliti menyebarkan kuisisioner sebanyak 600 kuisisioner untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan sample karena kuisisioner yang tidak kembali. Dari 600 kuisisioner yang akan disebar dibagi kepada kelima KPP yang menjadi sampel penelitian yaitu 120 kuisisioner pada KPP Madya dan 480 kuisisioner pada KPP Pratama yang menjadi sampel penelitian. Perbedaan jumlah kuisisioner yang disebar pada KPP Madya dan KPP Pratama didasarkan pada pertimbangan saat melakukan konsultasi kepada para Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta para Account Representative (AR) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II bahwa pada umumnya Wajib Pajak Badan Madya lebih kooperatif dalam memberikan keterangan ataupun permintaan data dibandingkan Wajib Pajak Badan Pratama. Sehingga pengembalian kuisisioner dari Wajib Pajak Madya dapat diprediksikan akan jauh lebih besar dari Wajib Pajak Badan Pratama.

### 3.4 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada empat instrumen penelitian yang digunakan :

1. Instrumen untuk mengukur Kesadaran Wajib Pajak
2. Instrumen untuk mengukur Modernisasi Sistem Administrasi Pajak
3. Instrumen untuk mengukur Tindakan Penegakan Hukum
4. Instrumen untuk mengukur Kepatuhan Pajak

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuisisioner yang meliputi operasionalisasi indikator variabel laten eksogen dalam penelitian yaitu :

---

<sup>109</sup>) Donald R.Cooper and C. William Emory, Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

persepsi Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas SDM, kualitas pelayanan, sistem informasi dan teknologi, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi dan pidana, kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Masing-masing variabel laten eksogen tersebut direfleksikan dalam sejumlah pertanyaan yang menjadi ukuran dalam analisis. Skala pengukuran dalam menguji *validitas* dan *realibilitas* instrumen penelitian menggunakan *Croncbach Alpha* dan ukuran validitas konstruk dan reliabilitas konstruk dari SEM

Tiap-tiap pertanyaan diberikan alternatif jawaban dengan mengacu pada model skala Likert. Kuisisioner yang diberikan dalam penelitian bersifat tertutup dan terbuka dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari subjek penelitian dengan memperhatikan tujuan penelitian.

### **3.5 Penentuan Variabel dan Defenisi Operasionalisasi Variabel**

#### **3.5.1 Klasifikasi dan Pemilihan Variabel**

Menurut Sekaran (1992:64), variabel adalah apa saja yang dapat membedakan nilai atau membuat suatu nilai bervariasi. Dalam tingkatan empiris, pada umumnya peneliti beranggapan bahwa istilah variabel memiliki arti yang sama dengan istilah *Construct*<sup>110</sup>. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan kausal antara variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Untuk itu perlu dilakukan operasionalisasi variabel untuk seluruh variabel laten eksogen dan variabel laten endogen dalam penelitian.

#### **3.5.2 Definisi Operasionalisasi Variabel**

Ada 10 variabel eksogen *first order* CFA dan 3 variabel eksogen *higher order* CFA yang akan diukur melalui indikatornya berupa pertanyaan dalam kuisisioner yang diberikan untuk tiap-tiap variabel. Pengukuran indikator melalui kuisisioner menggunakan data ordinal dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Operasionalisasi variabel eksogen dijabarkan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

---

<sup>110</sup>) Sekaran, Uma.1992, *Research Method for Business*, New York : John Willey and Sons, Inc.

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Eksogen

Variabel eksogen ( <i>higher order CFA</i> )	Variabel eksogen ( <i>first order CFA</i> )	Variabel terukur (Indikator)	Kode Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (Kode : Kesadara) adalah perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai <i>stimulus</i> yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.	Persepsi (Kode:Persepsi)	Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara	PERS1	Data ordinal dengan skala LIKERT
		Pajak telah dikelola/digunakan dengan baik oleh Pemerintah	PERS2	
		Pajak merupakan biaya (beban) dalam melakukan usaha	PERS3	
		Tarif Pajak yang berlaku (PPh: Tunggal/ <i>Flat</i> 28% dan PPN : tunggal 10%) saat ini sudah adil ( <i>fair</i> ) untuk seluruh pelaku usaha	PERS4	
		Ketaatan membayar pajak lemah karena banyaknya korupsi di pemerintahan	PERS5	
		Dapat menghindari pajak sebagian atau keseluruhan merupakan keuntungan	PERS6	
		Bekerjasama dengan fiskus untuk menghindari pembayaran pajak sebagian dan keseluruhan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan	PERS7	
	Pengetahuan dan Pemahaman ketentuan perpajakan (Kode:Pahaman)	Mengetahui seluruh aturan mengenai batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan	PAHAM1	
		Mengetahui seluruh tata cara menghitung pajak penghasilan (PPh) dengan benar sesuai bidang usaha	PAHAM1	
		Mengetahui seluruh tata cara menghitung PPN dengan benar sesuai bidang usaha.	PAHAM2	
		Dapat melakukan penyesuaian pada laporan/SPT anda (koreksi fiskal) sesuai Undang-Undang Pajak	PAHAM3	
		Mengetahui seluruh ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang dan peraturan pajak	PAHAM4	
		Dapat mengisi formulir SPT Masa dan Tahunan dengan benar	PAHAM5	
	Kondisi Keuangan (Kode:KonKeu)	Kondisi dan pengelolaan arus kas usaha/preusan	KEU1	
		Prospek perusahaan dalam memperoleh kemampuan laba ( <i>profit</i> )	KEU2	
		Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba	KEU3	
		Kemampuan perusahaan mengatasi kesulitan keuangan	KEU4	

Variabel eksogen ( <i>higher order CFA</i> )	Variabel eksogen ( <i>first order CFA</i> )	Variabel terukur (Indikator)	Kode Indikator	Skala		
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (Kode : SistemAd) adalah reformasi sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mencapai kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi.	Kualitas SDM (Kode:Aparatur)	Kompetensi pengetahuan aparat pajak dalam melakukan bimbingan dan pengawasan	KUASDM1	Data ordinal dengan skala LIKERT		
		Profesionalisme aparat pajak dalam melakukan tugasnya	KUASDM2			
		Loyalitas dan integritas aparat pajak	KUASDM3			
		Konsistensi aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya	KUASDM4			
	Kualitas Pelayanan (Kode:Layanan)	Ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan	LAYAN1			
		Keperdulian dan kecepatan dalam memberikan bantuan (empati)	LAYAN2			
		Sikap dan tingkah laku aparat pajak dalam melayani	LAYAN3			
		Kemudahan dalam membayar pajak	LAYAN4			
		Kemudahan dalam pelaporan pajak (SPT)	LAYAN5			
	Sistem Informasi Tehnologi (Kode:SistemIT)	Tehnologi informasi mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan	IT1			
		Tehnologi Informasi yang disediakan mudah dipahami dan digunakan	IT2			
		Tehnologi informasi mengurangi jalur birokrasi yang panjang	IT3			
		Tehnologi informasi meningkatkan transparansi	IT4			
	Tindakan Penegakan Hukum (Kode:PenHukum) adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk memastikan pembayar pajak patuh dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai Undang-Undang	Pemeriksaan Pajak (Kode:TaxAudit)	Pemeriksaan dapat membuat pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar dari seharusnya		PERIKSA1	Data ordinal dengan skala LIKERT
			Besar kemungkinan kecurangan pajak yang dilakukan terdeteksi dalam pemeriksaan		PERIKSA2	
			Pemeriksa Pajak memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi		PERIKSA3	
Setelah melalui pemeriksaan, pada tahun-tahun berikutnya akan menghitung dan melaporkan pajak/SPT dengan benar.			PERIKSA4			
Setelah melalui pemeriksaan, akan dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan benar .			PERIKSA5			
Pemeriksaan tidak akan diakhiri dengan negosiasi			PERIKSA6			
Sanksi Administrasi dan Pidanan (Kode:Sanction)		Pengenaan sanksi diperlukan atas ketidakpatuhan	SANKSI1			
		Sanksi yang lebih berat akan membuat menjadi lebih patuh	SANKSI2			
		Besar pengenaan sanksi telah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan	SANKSI3			
		Adanya sanksi menjamin kewajiban pajak dilakukan dengan benar	SANKSI4			

Terdapat 1 variabel endogen dengan 1 variabel eksogen CFA yang akan diukur melalui indikatornya berupa pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan untuk tiap-tiap variabel. Pengukuran indikator dilakukan melalui kuisisioner menggunakan skala ordinal dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Operasionalisasi variabel tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Operasionalisasi Variabel Endogen

Variabel endogen ( <i>higher order CFA</i> )	Variabel eksogen ( <i>first order CFA</i> )	Variabel terukur (Indikator)	Kode Indikator	Skala
Kepatuhan Pajak (Kode:Kepatuha) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang	Kepatuhan Materil (Kode:PatMate)	Perusahaan harus membayar pajak tepat waktu	MATERIL1	Data ordinal dengan skala LIKERT
		Penghitungan pajak terutang harus benar, tepat dan sesuai UU Pajak	MATERIL2	
		Perusahaan selalu melakukan koreksi fiskal (penyesuaian) pada laporan keuangan agar sesuai dengan UU Pajak	MATERIL3	
		Perusahaan melakukan kewajiban pajak dengan sukarela atau tanpa paksaan	MATERIL4	
	Kepatuhan Formil (Kode:PatForm)	Perusahaan harus melaporkan pajak tepat waktu	FORMIL1	
		Pengisian formulir pajak (SPT Masa dan SPT Tahunan) harus sesuai dengan keadaan sebenarnya	FORMIL2	

### 3.6 Pengujian Hipotesis

Setelah ditentukan metode analisis data, sampel, penentuan variabel serta operasionalisasi variabel, maka dapat diajukan pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil.

Hipotesis 2 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil.

Hipotesis 3 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara tindakan Penegakan Hukum (*tax law enforcement*) terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara tindakan Penegakan Hukum (*tax law enforcement*) terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil.

Hipotesis 4 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya.

Hipotesis 5 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Madya.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya.

Hipotesis 6 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara tindakan Penegakan Hukum (*tax law enforcement*) terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya.

Ho : ada hubungan yang positif dan signifikan antara tindakan Penegakan Hukum (*tax law enforcement*) terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya.

Hipotesis 7 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama.

Hipotesis 8 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama.

Hipotesis 9 : Ho : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara tindakan Penegakan Hukum (*tax law enforcement*) terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama.

H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara tindakan Penegakan Hukum (*tax law enforcement*) terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama.